

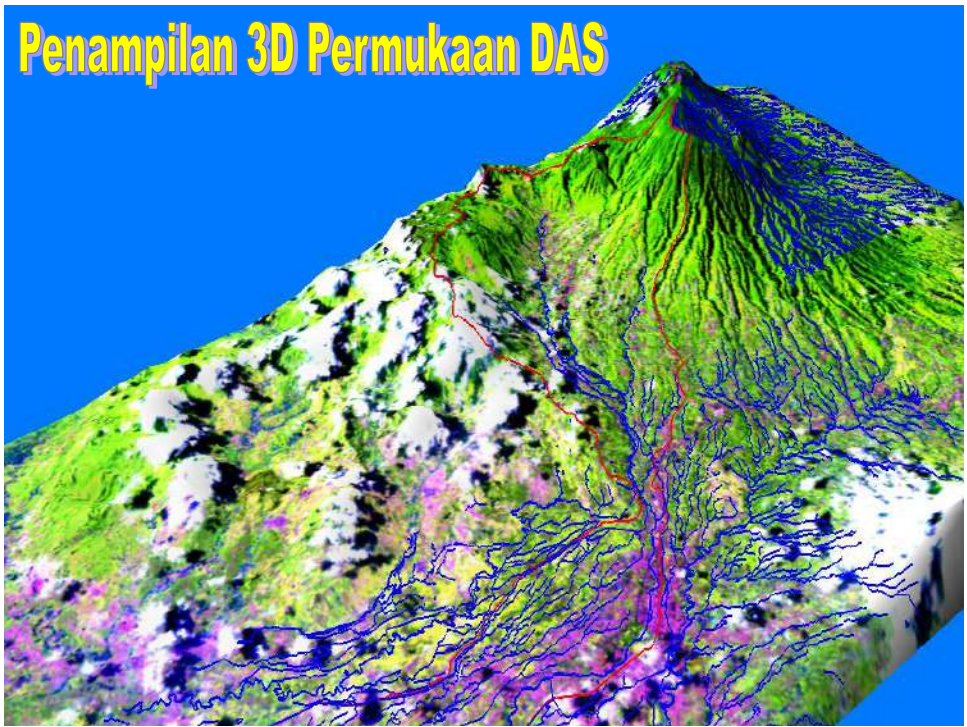


1

Klasifikasi Penggunaan Air

- Golongan A; yaitu air pada sumber air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan lebih dahulu.
- Golongan B; yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah menjadi air minum dan keperluan rumah tangga lainnya.
- Golongan C; yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- Golongan D; yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan listrik tenaga air.
- Golongan E; yaitu air yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut pada peruntukan air golongan A, B, C, dan D

2

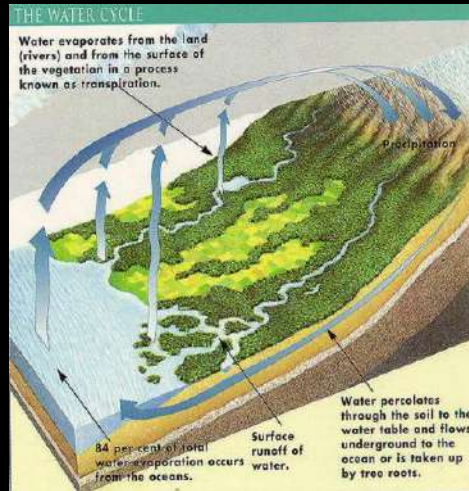
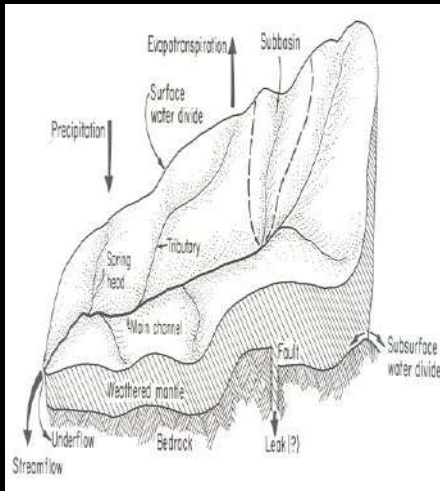


3



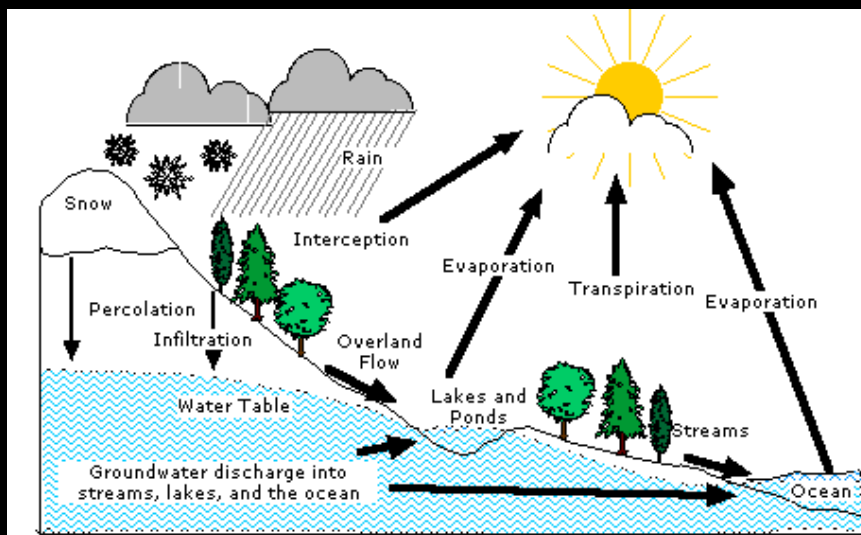
4

D A S DALAM SKETSA 3 DIMENSI



5

DAS SEBAGAI SISTEM HIDROLOGI



6

**PENDEKATAN DAS
DALAM PERENCANAAN WILAYAH**



7



8

DAS SEBAGAI UNIT ANALISIS



9

PENYEBAB DEGRADASI KONDISI DAS



10

MENGAPA PERLU PENGELOLAAN DAS DI INDONESIA ?

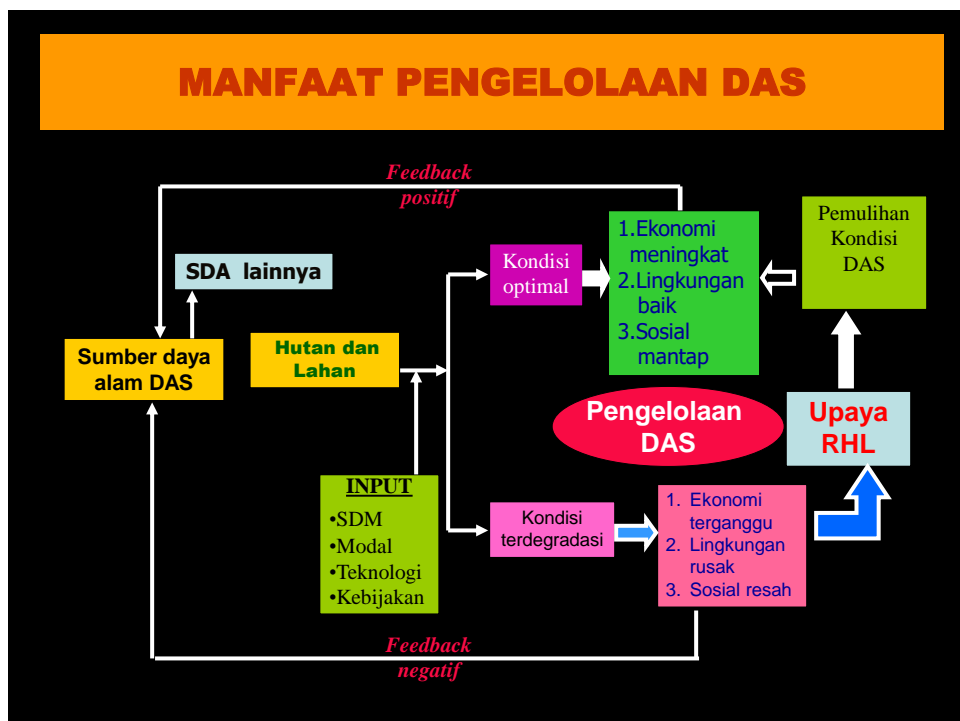
- Karena intensitas **curah hujan** yang tinggi, dan keadaan alam **geomorfologi** (geologi, tanah, topografi), dan **aktivitas manusia**, potensial mengakibatkan kerusakan sumber daya alam hutan, tanah dan air
- Karena **kelestarian sumber daya hutan, tanah dan air** perlu dijaga untuk kelangsungan pembangunan nasional dan daerah



- **Pengelolaan DAS** yang lintas wilayah administrasi mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan, tanah, air dan lingkungan hidup yang lestari

11

MANFAAT PENGELOLAAN DAS



12

PERANAN PENGELOLAAN DAS

- **DAS sebagai ekosistem alam, merupakan unit hidrologi (tata air):**
 - Air berperan sebagai integrator
 - Air merupakan indikator terbaik untuk pengelolaan DAS
- **Karena peran dan fungsi air tersebut, maka DAS sangat tepat sebagai unit pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)**
- **Karena DAS sebagai unit hidrologi, maka Pengelolaan DAS dapat memadukan kepentingan:**
 - Antar kelompok masyarakat di daerah hulu dan hilir DAS,
 - Antar wilayah administrasi
 - Antar instansi/lembaga terkait
 - Antar disiplin ilmu/profesi
 - Antar aktivitas di hulu dan hilir DAS

13

PERATURAN PER-UNDANG2 AN YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAS

- UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
- UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
- UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- PP No. 47 Tahun 1997 Tentang RTRWN
- PP No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dst. (Pengelolaan Hutan)
- PP No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
- PP No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan
- Kep Menhutbun No. 284/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Urutan Prioritas Daerah Aliran Sungai
- Kep Menhut No. 20/Kpts-II/2001 Tentang Pola Umum dan Standar Serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Kep Menhut No. 52/Kpts-II/2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS
- Kep Menhut No.SK.346/Menhut-V/2005 Tentang Kriteria Penetapan Urutan Prioritas DaS
- Peraturan Dirjen RLPS No.SK.167/V-SET/2004 Tentang Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis

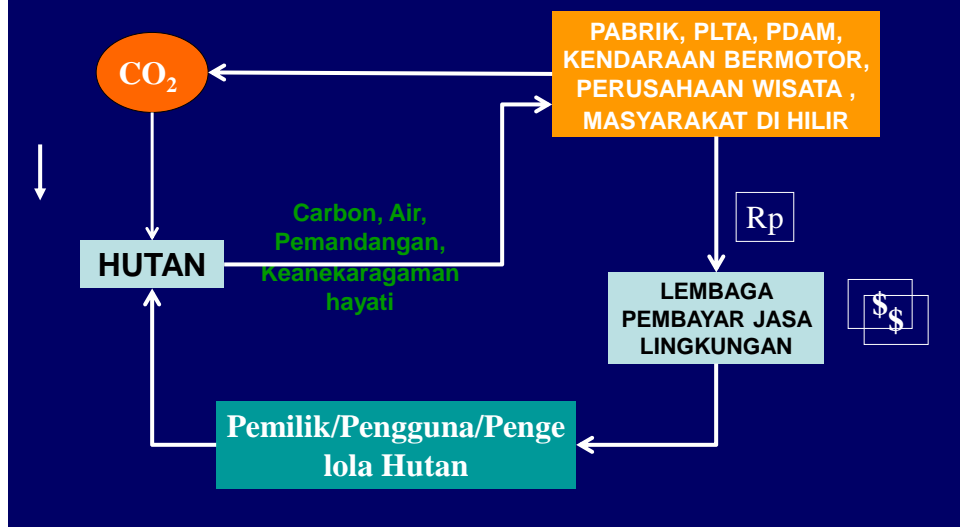
14

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN DAS

- **Pendekatan Ekosistem:** Satu DAS-Satu Rencana-Satu Pengelolaan Terpadu
- **Asas :** keterpaduan, kemanfaatan, kelestarian, keadilan
- **Penyelenggaraan :** koordinasi lintas sektor/daerah/disiplin ilmu, terpadu, menyeluruh, berwawasan lingkungan, , transparan, partisipatif dan akuntabel
- **Kontribusi pembiayaan** untuk pengelolaan sumber daya alam DAS
 - Prinsip Pemanfaat Membayar (*beneficiaries pay principle*) yaitu :
 - * Pengguna Membayar (*users pay principle*);
 - * Pembuat Polutan/Limbah Membayar (*polluters pay principle*);
 - Prinsip Kewajiban Pemerintah (*government obligation principle*)
- **Keselarasn dengan rencana tata ruang wilayah (RTRWP/RTRWK)**
- **Tidak melampaui daya dukung wilayah dan daya tampung lingkungan**
- **Selaras dengan otonomi daerah**, nilai budaya dan kearifan tradisional masyarakat setempat

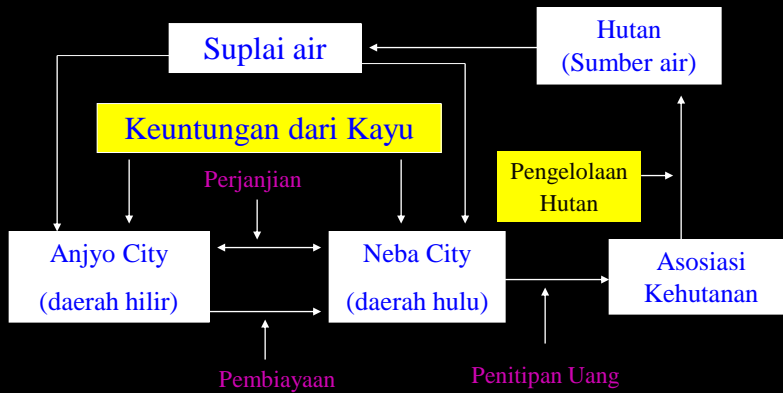
15

MODEL MEKANISME PENDANAAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN DALAM DAS



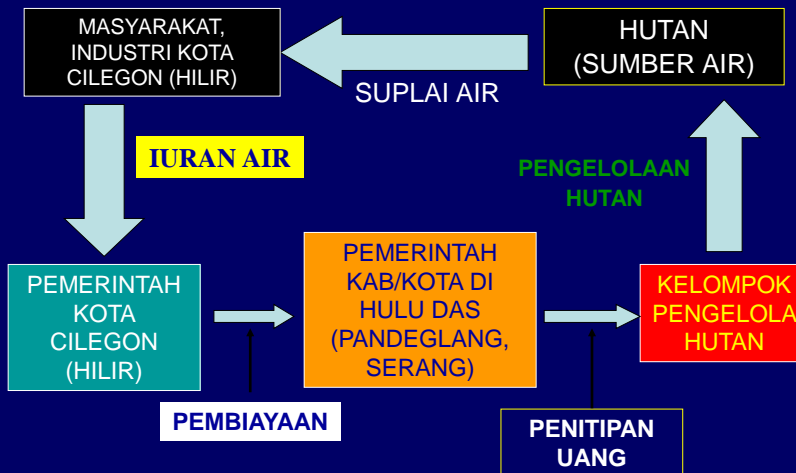
16

MODEL PENGELOLAAN DAS HULU DENGAN SISTEM *PROFIT-SHARING* DI JEPANG



17

ALTERNATIF PENDANAAN PENGELOLAAN DAS CIDANAU, PROP. BANTEN



18

